

## BAB II

### KONSTELASI KEAMANAN DI ASIA PASIFIK

#### 2.1 Rivalitas Keamanan Cina-Amerika Serikat di Asia Pasifik

Tumbuhnya multilateralisme di kawasan menjadi sebuah penanda bagi perubahan terhadap keamanan regional. Dimana bentuk regionalisme ini bergeser dari pola lama yang dibentuk berdasarkan hubungan bilateral dan sebuah bentuk dari manajemen konflik.<sup>1</sup> Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menjawab sebuah isu keamanan kawasan adalah konsep yang dikemukakan oleh Barry Buzan yang menerangkan dimana keamanan merupakan sebuah fenomena integral yang relasional. Dengan demikian keamanan dari sebuah negara maupun kawasan mustahil untuk dipahami hanya dengan menganalisis satu permasalahan saja. Tetapi perlu untuk memahami pola interdependensi keamanan dalam kawasan tersebut, terkhususnya keamanan diantara negara-negara yang berada dalam suatu kawasan.<sup>2</sup> Apa yang dimaksud Buzan dengan fenomena yang relasional ini merupakan apa yang disebutnya sebagai *regional security complex theory*. Dimana teori ini oleh Buzan disebutkannya sebagai: “*a group of states whose primary security concern link together sufficiently closely that their national security cannot realistically be considered apart from one another*”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Amitav Acharya, 2002, “Regionalism and the Emerging World Order: Sovereignty, Autonomy and Identity.” In S. Breslin, W. C. Hughes, N. Phillips, & B. Rosamond (Eds.), *New Regionalisms in the Global Political Economy: Theories and Cases*, pp. 20-33, 10.4324.

<sup>2</sup> Barry Buzan, 1987, *An introduction to strategic studies: military technology and international relations*. Macmillan.

<sup>3</sup> Ibid.

Salah satu cara terbaik untuk melakukan analisis keamanan regional adalah dengan pola *amity* dan *enmity* yang ada dalam negara-negara di kawasan. Pola *amity* dan *enmity* ini nantinya akan digabungkan dengan faktor global maupun domestik yang ada pada negara-negara di kawasan.<sup>4</sup> Dengan demikian, kita dapat mengetahui bagaimana intensitas ketegangan antara negara dalam suatu kawasan. Di samping itu, pola ini juga tak dapat melupakan bagaimana *distribution of power*. Ini disebabkan oleh kemunculan dari pola ini yang muncul akibat dari beberapa hal spesifik seperti kepentingan yang berkaitan dengan sengketa perbatasan, etnis, ataupun warisan sejarah lama.

Cina dan AS memiliki hubungan dan catatan sejarah hubungan yang kompleks, sejarah hubungan antara Cina dan AS diwarnai dengan ketegangan, terutama pada perang dingin yang dimana terjadinya persaingan ideologi antara keduanya. Pada masa perang dingin, Cina dan AS berada dalam dua kutub yang berbeda, Cina dengan komunis-sosialisnya, sementara AS dengan demokrasi liberalnya. Kondisi membuat hubungan antara kedua negara ini menjadi sangat sensitif dan bersifat konfliktual.

Saat ini berbagai kekuatan besar di dunia seperti Cina, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat telah bertemu di kawasan Asia Pasifik. Cina sendiri saat ini disebut-sebut sebagai '*new emerging superpower*' di Asia Pasifik.<sup>5</sup> Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan mengingat Asia Pasifik seringkali diposisikan sebagai sebuah 'hub' atau medan interaksi dari negara-negara dengan kekuatan besar

---

<sup>4</sup> Ole Weaver and Barry Buzan, 2003, *Regions and powers: the structures of international security*, Cambridge University Press.

<sup>5</sup> Ted Fishman, 2006, *China, Inc.: How the Rise of the Next Superpower Challenges America and the World*. Scribner, Accessed 9 October 2023.

dengan negara-negara lainnya. Otomatis hal ini akan mengganggu upaya dari negara lain di Asia Pasifik yang telah berupaya untuk menciptakan stabilitas keamanan untuk mewujudkan kepentingan nasional bersama di Asia Pasifik. Dengan bertemunya negara-negara dengan kekuatan besar seperti ini, akan memudahkan Asia Pasifik menjadi tempat persaingan kekuatan pertahanan antara negara-negara tersebut.<sup>6</sup>

**Tabel 2.1 Pengeluaran Anggaran Cina-AS tahun 2020-2021  
(Dalam Miliar US\$)**

Tahun	Cina	Amerika Serikat	Peningkatan
2020	181.1	684.6	6.31%
2021	193.3	738	7.23%

Sumber: International Institute for Strategic Studies (2020).

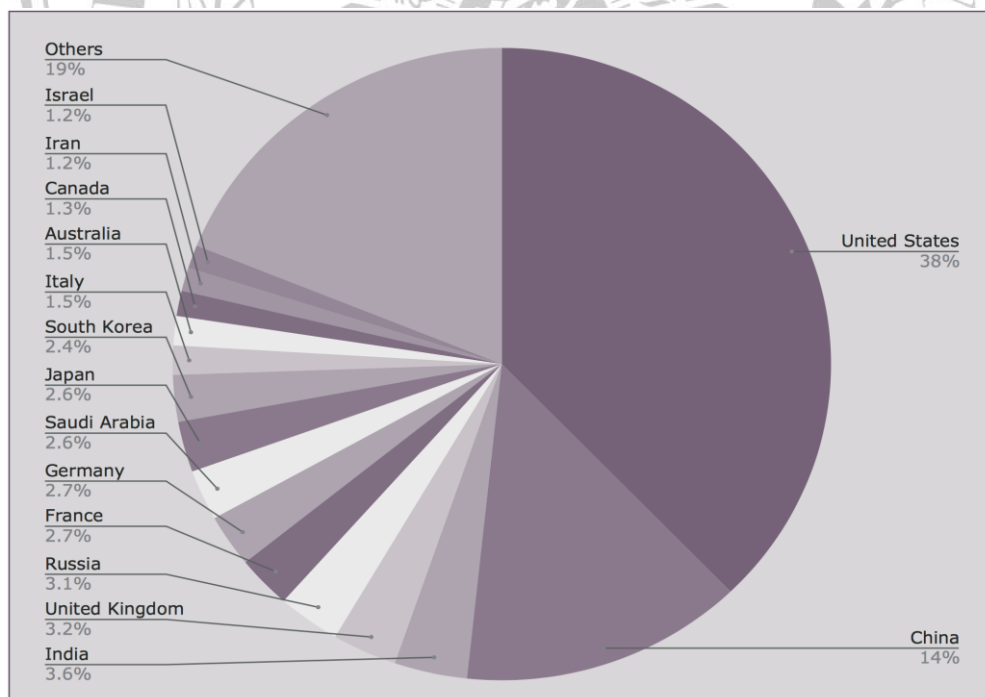
Kennedy dkk, menyebutkan bahwa negara-negara di Asia Pasifik dalam upayanya untuk menjaga stabilitas kawasan, memaksa mereka untuk mengeluarkan anggaran militer yang tinggi dan terus mengalami peningkatan (Kennedy et al.). Amerika Serikat sendiri mengalami peningkatan mencapai angka 7.23% dan Cina mengalami peningkatan hingga 6.31%. Meski begitu, Amerika Serikat masih diunggulkan dalam hal ini karena memiliki anggaran yang disebar pada pos-pos

<sup>6</sup> Armaidly Armawi and Erlan Wijatmoko, 2022, *Asia Pasifik Memanas, Ancamankah Bagi ASEAN dan Indonesia*, *Intermestic: Journal of International Studies*, vol. 7, no. 1, (365-389), hlm. 371.

yang lebih luas dan besar. Hal ini disebabkan karena Amerika juga menerapkan strategi *preemptive strike* yang berada di luar wilayah teritorialnya.<sup>7</sup>

Di samping itu, Amerika Serikat juga terlibat dalam mengatasi konflik-konflik global sehingga pengeluaran juga dialokasikan ke biaya perang dan operasional pangkalan militer yang disebutkan tadi. Dibanding Cina, pengeluaran anggaran militernya yang notabene berada di bawah Amerika, ini tetap menjadi kemajuan bagi Cina ditengah perkembangan ekonominya. Peningkatan anggaran militer dari Cina ini, sejauh ini terfokus pada penguatan kekuatan pertahanan dalam negeri Cina.<sup>8</sup>

**Gambar 2.1 Pangsa Belanja Militer Dunia dari 15 Negara dengan Belanja Tertinggi Tahun 2021**



Sumber: [https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-04/fs\\_2204\\_milex\\_2021\\_0.pdf](https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-04/fs_2204_milex_2021_0.pdf)

<sup>7</sup> Klaus Dodds, 2007, *Geopolitics: A Very Short Introduction*. OUP Oxford.

<sup>8</sup> Op. cit, Armaid Armawi and Erlan Wijatmoko, hlm. 372.

Melihat diagram yang dikeluarkan oleh Sipri mengenai pangsa belanja militer dari 15 negara dengan belanja tertinggi ditahun 2021 tersebut, Amerika Serikat memiliki perbelanjaan tertinggi dengan dua kali lipat dari perbelanjaan dari Cina sendiri. Ketakutan paling besar yang dimiliki oleh Cina saat ini adalah perkembangan dan penempatan personel militer AS di sekitaran teritorial Cina yang berpotensi melanggar batas wilayah Cina. Dalam hal ini lah Cina kemudian mendefinisikan strategi militernya dalam beberapa tahun ke depan. Ancaman klaim teritorial di Laut Cina Selatan dan hubungannya dengan Taiwan merupakan argumen yang ditekankan oleh Cina saat ini.<sup>9</sup>

## **2.2 Hubungan Cina dan Amerika Serikat di Asia Pasifik**

Beberapa peneliti keamanan di kawasan Asia Pasifik beranggapan bahwa kepentingan dari negara-negara yang ada pada kawasan ini akan lebih banyak berfokus pada sektor perairan, begitu juga halnya dengan respon mereka akan ancaman keamanan yang ada. Melihat kenyataan ini, negara-negara di kawasan ini merespon hal ini dengan membentuk *Sea Lanes of Communication* (SLOC) dan *Sea Lanes of Trade* (SLT). Kedua kerjasama ini memiliki posisi yang sangat sentral bagi perdagangan kawasan maupun internasional. Lebih jauh dari itu, melihat dimensi maritim yang begitu vitalnya di kawasan, menjadi sangat rasional melihat hal ini menjadi faktor pertimbangan dari tiap negara untuk mengambil kebijakan keamanan ataupun hal-hal strategis lainnya untuk diproyeksikan sebagai kekuatan mereka ke luar batar teritorial yang dimiliki. Dengan demikian, dalam kawasan

---

<sup>9</sup> Roberto Bendini, 2016, *United States - China Relations: A Complex Balance Between Cooperation and Confrontation*, Directorate General for External Policies Policy Department, European Union, hlm. 17.

yang memiliki postur maritim yang sangat kuat, maka kita dapat mengindikasikan bahwa negara yang memiliki kekuatan maritim berpotensi untuk mengendalikan konstelasi politik serta perkembangan strategis di kawasan.

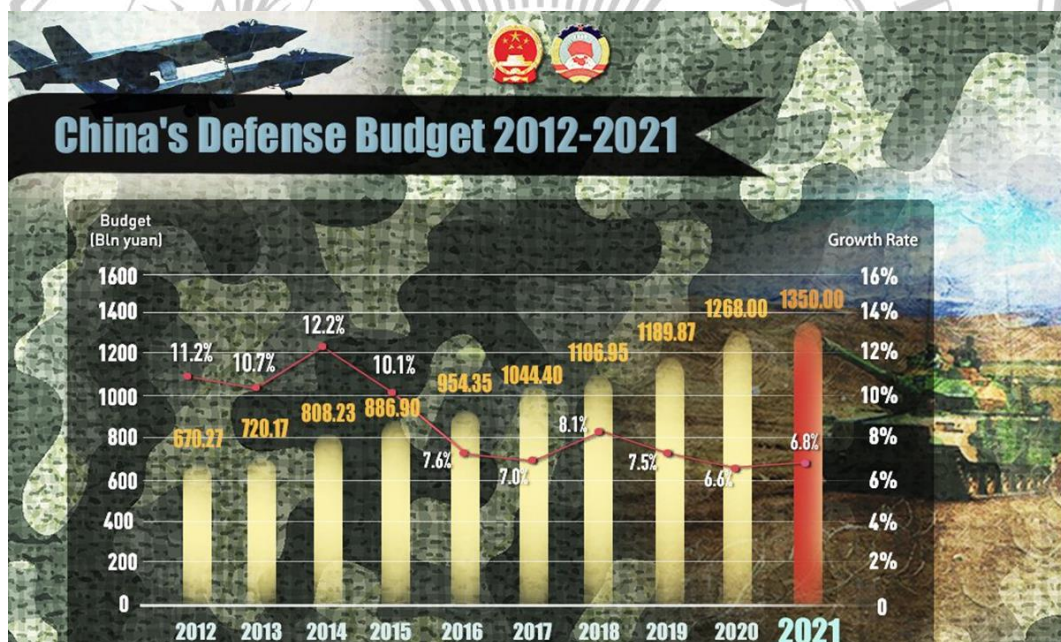
Dengan perkembangan kawasan yang tak dapat diprediksi tersebut dapat dikatakan bahwa kondisi ini membawa Asia Pasifik pada wilayah yang diperebutkan untuk mendapatkan supremasi di laut yang pastinya akan didapatkan dari persaingan strategis antar beberapa negara di kawasan bahkan AS yang saat ini masih menjadi negara *super power*. Peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik ditunjukkan dengan pasukan Marinir dan Angkatan Udaranya. Selain itu, AS juga telah menyiapkan langkah preventif sedini mungkin dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan di kawasan ini dengan menerapkan kebijakan *pre-emptive strike*. Kepentingan geopolitik Amerika Serikat menuntut Amerika untuk mencari jalan keluar atas masalah-masalah yang bisa saja terjadi kapan saja di sekitaran teritorialnya. Di bagian Barat, Amerika Serikat berbatasan dengan Laut Pasifik. Dengan kondisi geopolitik seperti ini, Amerika Serikat menanganinya dengan membangun Pangkalan Udara Hickam yang menjadi basis bagi *Pacific Air Force* (PACAF) yang sebelumnya dibangun di Osan, Korea Selatan dan di Yokota, Jepang. PACAF ini lah yang nantinya akan menjadi komando utama bagi Angkatan Udara yang berada di luar teritori Amerika Serikat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Frances McKenney, 2010, *AFA National Report*, Air Force Magazine, <https://www.airandspaceforces.com/PDF/MagazineArchive/Documents/2010/October%202010/10natrep.pdf>. Accessed 12 July 2023.

Keberlanjutan dari persepsi AS akan ancaman keamanan oleh Cina ini terlihat dari bagaimana anggaran militer Cina yang kian meningkat pada tiap tahunnya. Pada 2012 saja Cina telah meningkatkan anggarannya sebanyak 11,2% dari tahun sebelumnya dimana anggaran militer Cina. Angka tersebut sangatlah fantastis melihat anggaran militer Cina pada 2011 hanya 601.1 miliar Yuan. Meskipun angka ini masih berada di bawah anggaran militer milik AS, tetapi ini menjadikan Cina sebagai negara dengan anggaran militer terbesar kedua di dunia di bawah AS. Terhitung hingga tahun 2021 anggaran yang dikeluarkan oleh Cina untuk belanja militer berada pada angka 1.350 miliar Yuan.

**Gambar 2.2 Pertumbuhan Anggaran Militer Cina Tahun 2012-2021**



Sumber:

<https://www.globaltimes.cn/Portals/0/attachment/2021/2021-03-04/c24adfd0-313d-4c68-9de9-402cbb026c41.jpeg>

Pertumbuhan anggaran militer Cina ini dikaitkan dengan tujuan dari Cina untuk mengatasi masalah yang disebut sebagai ‘perang lokal’.<sup>11</sup> Perang lokal ini sendiri merupakan suatu istilah yang merujuk pada sengketa wilayah Cina dengan negara-negara yang berbatasan dengannya terutama negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah yang telah digariskan oleh Cina di Laut Cina Selatan.

Di pihak sebelah, AS yang kian meningkatkan kehadirannya di Asia Pasifik, melalui Menteri Pertahanan Panetta, dalam acara dialog pertahanan kawasan di Singapura, *Shangri La Dialogue*, mengadakan kesepakatan dengan Singapura untuk mengisi logistik dan *overhaul* sebelum mereka melanjutkan misinya di kawasan. Bagi Singapura yang sebenarnya tidak mengizinkan pasukan AS untuk menyentuh daratan, melihat bahwa kapal-kapal perang dari AS ini memberikan mereka jaminan akan keamanan negaranya di kawasan. Kondisi yang seperti ini jelas menjadi ancaman bagi Cina yang menganggap bahwa hal tersebut justru akan semakin menambah ketegangan di kawasan. Belum lagi dengan AS yang dalam dialog keamanan di Singapura tersebut menyampaikan ambisinya untuk menggaet mantan musuhnya, Vietnam, untuk lebih banyak menyandarkan kapalnya di kawasan ini untuk mencegah dominasi yang kian terlihat dari Cina di kawasan.<sup>12</sup>

Terbaru, pada September 2021 lalu, AS beserta Inggris dan Australia bekerjasama untuk memberi bantuan kapal selam bertenaga nuklir pada Australia.

---

<sup>11</sup> M. Taylor Fravel, 2005, *The Evolution of China's Military Strategy: Compring The 1987 and 1999 Editions of Zhanuexue*, In *China's Revolution in Doctrinal Affairs: Emerging Trends in the Operational Art of the Chinese People's Liberation Army* (pp. 79-99). Edited by: James Mulvenon and David Finkelstein.

<http://web.mit.edu/fravel/www/fravel.2005.evolution.china.military.strategy.pdf>

<sup>12</sup> William Wan, 1 June 2012, “Panetta, in speech in Singapore, seeks to lend heft to U.S. pivot to Asia.” *The Washington Post*, [https://www.washingtonpost.com/world/panetta-arrives-in-singapore-for-conference-with-asian-leaders/2012/06/01/gJQAxdul6U\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/panetta-arrives-in-singapore-for-conference-with-asian-leaders/2012/06/01/gJQAxdul6U_story.html). Accessed 12 July 2023.



Aliansi ini kian menambah ketegangan yang ada di kawasan Asia Pasifik, pasalnya banyak dari negara-negara Asia Pasifik memprotes aliansi ini karena melanggar perjanjian nonproliferasi yaitu pembatasan penggunaan senjata nuklir. Meskipun negara-negara yang tergabung dalam aliansi mengelak dengan dalih bahwa kapal tersebut hanya bersenjata nuklir, tetapi hanya bertenaga nuklir, ini tetap meningkatkan ketegangan yang ada di kawasan. Artinya ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa persaingan yang ada di Asia Pasifik berlangsung pada wilayah perairan, terutama pada wilayah Laut Cina Selatan.

### **2.2.1 Cina dan Penjualan Senjata Amerika Serikat ke Taiwan**

Hubungan Cina dan AS selama ini terbilang sangat fluktuatif. Tetapi kini tampaknya kedua negara tengah berada pada posisi yang klimaks untuk menentukan bagaimana hubungan kedua negara untuk selanjutnya. Peningkatan perekonomian dan terus meningkatnya rasa nasionalisme rakyat Cina dapat dikatakan sebagai faktor utama yang mempengaruhi stabilitas hubungan Cina dan Amerika Serikat.<sup>13</sup> Di tengah kedua faktor tersebut, usaha Cina untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan adalah salah satu hal yang perlu dipahami dalam melihat kompleksitas hubungan antara Cina dan Amerika Serikat.<sup>14</sup> Amerika Serikat dalam merespon sikap *People's Liberation Army* Cina ini kemudian memberlakukan strategi penangkalan (*deterrence*) melalui *Taiwan Relations Act* (TRA).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Yan Xuetong, 2010, *The Instability of China-US Relations*, vol. 3, no. 3, pp. 263-292, <https://www.jstor.org/stable/48615785>.

<sup>14</sup> Yong Deng, 2012, *China's Struggle for Status: The Realignment of International Relations*. Cambridge University Press, hlm 251.

<sup>15</sup> See-Won Byun, 2016, *China's Major-Powers Discourse in the Xi Jinping Era: Tragedy of Great Power Politics Revisited*, Asian Perspective, vol. 40, no. 3, pp. 493-522, <https://www.jstor.org/stable/44074793>, hlm 497.

Taiwan sendiri merupakan negara yang sangat penting dan strategis bagi Cina. Kehilangan Taiwan akan memberikan dampak yang sangat buruk dan kompleks bagi Cina. Bagi Cina sendiri, deklarasi Taiwan sama halnya dengan deklarasi perang yang ditujukan terhadapnya. Apabila Cina gagal mempertahankan Taiwan, maka kerusuhan seperti di Tibet dan Xinjiang tak dapat lagi terelakkan. Oleh karena itu, reunifikasi merupakan satu-satunya pilihan bagi Cina jika ingin melindungi kepentingannya.<sup>16</sup>

Dengan kondisi seperti ini, banyak dari para elit Cina menganggap bahwa kehilangan Taiwan merupakan kelemahan bagi Cina, sebaliknya jika reunifikasi berhasil dilakukan, maka itu akan menjadi tambahan kekuatan bagi Cina baik secara politis maupun strategis. Mengenai hal ini, Direktur *Institute of International Studies* Universitas Tsinghua, Yan Xuetong mengatakan hal yang serupa dengan menyebutkan bahwa “*If China lacks the ability to preserve national unity, it cannot rise to be a world power, nor can it achieve national rejuvenation.*”<sup>17</sup> Hal yang seperti ini juga tidak hanya terdapat pada akademisi dan elit Cina, perasaan serupa juga ada pada masyarakat di Cina Daratan yang menilai bahwa kegagalan Cina dalam reunifikasi dengan Taiwan membuat kebangkitan Cina tidaklah berarti apa-apa.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Robert S Ross, 2002, “Navigating the Taiwan Strait: Deterrence, Escalation Dominance, and U.S.-China Relations.” *International Security*, vol. 27, no. 2, pp. 48-85, <https://www.jstor.org/stable/3092143>.

<sup>17</sup> Op.cit, Yong Deng, hlm. 256-257.

<sup>18</sup> Ian Bremmer, 30 April 2013, “China's Changing Role in Asia.” *Carnegie Endowment for International Peace*, <https://carnegieendowment.org/2013/04/30/china-s-changing-role-in-asia-pub-51590>. Accessed 7 October 2023.

Ambisi Cina untuk bersatu dengan Taiwan terhambat oleh kehadiran dari Amerika Serikat. Amerika yang terus menyuplai senjata ke Taiwan dalam jumlah besar membuat *mindset* dari Perang Dingin tetap hidup bahkan dari pihak Amerika Serikat. Suplai senjata yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini bukanlah tanpa tujuan, hal ini dilakukan untuk menangkal perilaku agresif yang dilakukan oleh Cina yang terus berupaya merangkul kembali Taiwan. Amerika Serikat dan Taiwan sejak 1945 menjalin hubungan dengan Taiwan melalui perjanjian *Sino-American Defense Treaty* dan kemudian digantikan dengan *Taiwan Relations Act* (TRA) di tahun 1979. Dengan perjanjian ini AS dan Taiwan tetap dapat menjalin hubungan non-formal dalam hal perdagangan, kebudayaan, dan lainnya.

Hingga kini, hubungan antara AS dan Taiwan masih menjadi penghambat bagi Cina untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan. Keberhasilan dari strategi deterens Amerika Serikat ini tidak terlepas dari kekuatan militer yang dimilikinya. Dibandingkan dengan Cina, kapabilitas militer Amerika Serikat masih terlampau jauh dari Cina yang berada di bawahnya. Meski belanja militer Cina hingga pada tahun 2021 terus mengalami peningkatan, tetapi itu belum cukup untuk mencapai kapabilitas militer yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

Bagi sebagian pemikir realis, anggapan bahwa Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara *superpower* masih tidak terbantahkan. Bahkan dalam sebuah forum, Robert Jervis mengatakan bahwa “*As a Realist, the only condition under which I see American hegemony end is when another state reaches the power of the US – without that, there just isn’t a challenger. I don’t like this, but despite all the internal problems the US faces right now, I just don’t see any challenger rising*”

soon.”<sup>19</sup> Bukan tanpa alasan, klaim dari Robert Jervis tersebut didukung oleh data *Global Firepower* (GFP) yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih berada di posisi tertinggi dari negara-negara dengan kapabilitas militer. Data dari GFP sendiri diperoleh melalui beberapa variabel seperti kekuatan angkatan udara, darat, laut, personel militer, anggaran pertahanan, sumber daya alam, serta geografi.<sup>20</sup>

Dalam permasalahan ini, PLA memiliki peran yang sangat sentral bagi posisi nasional Cina terhadap hubungan yang dimiliki oleh Taiwan dan AS. Kemungkinan ini bisa saja membawa PLA untuk memutuskan tindakan yang berujung pada konflik langsung di wilayah tersebut. Peran militer dalam krisis antara Cina dan Taiwan pada tahun 1995-1996 yang mencakup tindakan militer dan diplomatik Cina menunjukkan signifikansi militer Cina dalam masalah Taiwan ini. Kini masalah hubungan antara AS dan Taiwan menjadi perhatian utama bagi para pemimpin PLA. Di samping itu para elit militer ini juga terus berupaya mempengaruhi pengambilan keputusan dalam berbagai permasalahan luar negeri terkait penjualan senjata, non-proliferasi dan percobaan nuklir, keamanan multilateral hingga permasalahan di Laut Cina Selatan.

Ketegangan antara Cina dan Taiwan meningkat pada tahun 2020, ketika Cina meningkatkan tekanan politik dan militer yang ditujukan terhadap Taiwan. Pada bulan Januari 2020, meskipun ada campur tangan Cina dalam pemilu, Presiden Tsai Ing-wen memenangkan pemilihan kembali untuk masa jabatan kedua. Cina melanjutkan penangguhan komunikasi formal dengan Taiwan, seperti

---

<sup>19</sup> Theory Talks, 24 July 2008, “Theory Talk #12: Robert Jervis.” *Theory Talks*, <http://www.theory-talks.org/2008/07/theory-talk-12.html>. Accessed 7 October 2023.

<sup>20</sup> Global Fire Power, “2023 Military Strength Ranking.” *Global Firepower*, <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>. Accessed 7 October 2023.

yang dilakukan pada tahun 2016, dan tetap teguh bahwa Taiwan harus menerima pandangan Beijing mengenai “Konsensus 1992” untuk memulai kembali keterlibatan formal. Para pemimpin Tiongkok secara langsung menyamakan “Konsensus 1992” dengan “Prinsip Satu Tiongkok” yang ditegaskan Beijing yang ditegaskan kembali oleh Sekretaris Jenderal Xi dalam pidatonya pada bulan Januari 2019 kepada “rekan senegaranya” di Taiwan. Presiden Tsai terus berjanji untuk mempertahankan status quo dalam hubungan lintas Selat dan menyerukan Cina untuk menghormati demokrasi Taiwan dan menyetujui negosiasi tanpa prasyarat. Dalam pidato pelantikannya pada bulan Mei 2020, Tsai menegaskan kembali bahwa kebijakannya terhadap Cina akan didasarkan pada konstitusi Republik Tiongkok dan undang-undang yang mengatur hubungan lintas Selat, dengan kesediaan untuk terlibat dalam dialog mengenai prinsip-prinsip “perdamaian, kesetaraan, demokrasi, dan perdamaian.” dialog” yang menimbulkan ketidaksenangan Cina.

PLA terus mempersiapkan kemungkinan di Selat Taiwan untuk menghalangi, dan jika perlu, memaksa Taiwan untuk meninggalkan upaya menuju kemerdekaan. PLA juga mempersiapkan kemungkinan untuk menyatukan Taiwan dengan Cina secara paksa, sekaligus menghalangi, menunda, atau menolak intervensi pihak ketiga apa pun, seperti Amerika Serikat dan/atau mitra lain yang berpikiran sama, atas nama Taiwan. Sebagai bagian dari kampanye komprehensif untuk menekan Taiwan dan pemerintahan Tsai, dan menandakan ketidak senangnya terhadap memanasnya hubungan Washington-Taipei, Tiongkok terus-menerus melakukan operasi militer di dekat Taiwan dan pelatihan militer

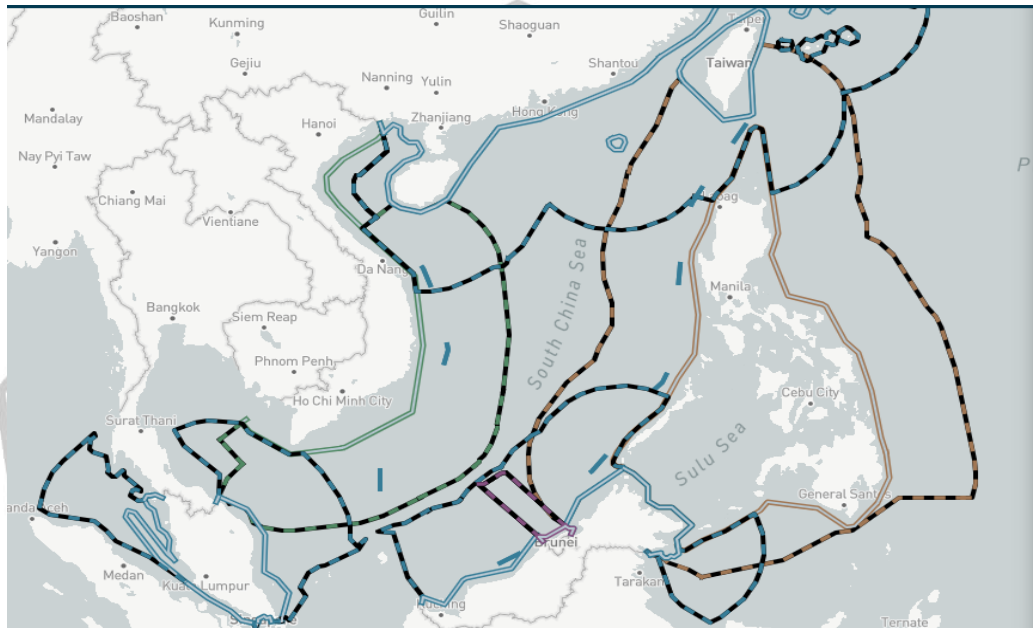
untuk kontingensi Taiwan. Sepanjang tahun 2020, militer Tiongkok meningkatkan tindakan provokatif di dalam dan sekitar Selat Taiwan, termasuk penerbangan berulang kali ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara Taiwan dan melakukan latihan tempur seperti operasi perebutan pulau. Pada tahun 2020, Beijing juga secara terbuka menyangkal keberadaan ‘garis tengah’ Selat Taiwan, sebuah perjanjian diam-diam selama puluhan tahun antara kedua belah pihak yang dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan perhitungan dan menghindari memicu krisis yang tidak disengaja.

### **2.2.2 Permasalahan di Laut Cina Selatan**

Laut Cina Selatan kini telah menjadi wilayah yang menjadi fokus perhatian regional bahkan internasional karena menjadi daerah yang berpotensi menjadi *flashpoint* konflik terbuka akibat perebutan kepulauan, sumber daya alam, dan wilayah perairan. Sejauh ini, Kepulauan Spratly menjadi wilayah yang paling dikhawatirkan akan menjadi penyebab bagi ketidakstabilan yang terjadi di Asia Tenggara. Hal ini tidak terlepas dari perebutan klaim wilayah tersebut seperti Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam. Posisi strategis Kepulauan Spratly yang diapit oleh dua samudra (Pasifik dan Atlantik) membuat wilayah ini menjadi jalur pelayaran untuk berbagai kepentingan ekonomi, keamanan, maupun politik. Hal ini menyebabkan kekhawatiran pada negara-negara di kawasan akan besarnya potensi konflik yang ditimbulkan oleh klaim-klaim yang datang untuk wilayah ini. Di samping itu, Laut Cina Selatan terkhusus Kepulauan Spratly juga memiliki sumber kekayaan laut hayati (perikanan) dan non hayati (minyak dan mineral). Beberapa alasan ini menjadikan pulau-pulau yang termasuk dalam gugusan Kepulauan

Spratly memiliki arti yang sangat penting. Oleh karena itu, wajar jika saat ini kita melihat Laut Cina Selatan khususnya Kepulauan Spratly menjadi wilayah sengketa bagi negara-negara sekitarnya.<sup>21</sup>

**Gambar 2.3 Peta Klaim di Laut Cina Selatan**



Sumber: <https://amti.csis.org/maritime-claims-map/>

Kebutuhan akan energi merupakan salah satu faktor utama yang mendasari klaim Cina atas kedaulatannya di Laut Cina Selatan. Kebutuhan ini datang dari kekurangan energi yang dimiliki oleh Cina dalam menjalankan program modernisasi ekonomi Cina. Meskipun saat ini Cina memiliki cadangan batubara dalam jumlah besar, tetapi penggunaan batubara sendiri terlalu banyak menimbulkan polusi. Pembangunan fasilitas nuklir membutuhkan waktu yang cukup panjang sama halnya pembuatan pembangkit listrik tenaga air yang

<sup>21</sup> Asnani Usman, 1997, *Konflik Laut Cina Selatan: tantangan bagi ASEAN*. Centre for Strategic and International Studies, hlm. 1.

dilakukan di Sungai Yangtze. Dengan demikian kebutuhan Cina akan minyak dan gas alam menjadi sangat penting dan diperkirakan pada dekade berikutnya akan meningkat di angka 5 hingga 6 persen.

Di tengah kebutuhannya akan minyak dan gas alam, kompleksitas permasalahan ini menjadi bertambah melihat bahwa cadangan minyak dan gas alam Cina berada di wilayah Xinjiang. Dimana daerah ini berada terletak jauh dari daerah konsumsi penggunaan sumber daya tersebut oleh Cina. Di sisi lain, pilihan untuk mengimpor minyak dan gas alam juga menjadi sulit karena membutuhkan nilai tukar asing. Kondisi seperti ini kemudian menjadikan Kepulauan Spratly sebagai potongan kecil dalam teka-teki besar yang harus diselesaikan oleh Cina dengan cara-cara diplomatik dan mau tidak mau pasang badan militer.

Mengenai politik luar negeri Cina di Asia Tenggara, Laut Cina Selatan dianggap sebagai bagian dari wilayah dimana Cina dinilai memiliki proyeksi strategis yang aktual. Pasca konflik Kamboja berakhir, alasan Cina untuk hadir dan berperan di Asia Tenggara berubah. Sebelumnya konflik Kamboja selalu menjadi alasan kuat bagi Cina untuk hadir dan beraktivitas di Asia Tenggara. Oleh karena itu, sikap Cina yang bersikeras mempertahankan klaimnya di Laut Cina Selatan menimbulkan kekhawatiran akan ambisinya di Asia Tenggara sebagai penegasan bahwa Cina merupakan negara besar di kawasan Asia Pasifik dengan Angkatan Bersenjata dengan proyeksi Angkatan Laut ke laut lepas.<sup>22</sup>

Banyaknya negara sekutu Amerika Serikat di Asia Tenggara juga membawa Cina pada kondisi yang semakin kompleks. Meski kehadiran Amerika Serikat di

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 16.



Asia Tenggara secara tidak langsung memberikan gambaran yang sedikit lebih jelas bagi Cina mengenai peta politik di Asia Tenggara, di sisi lain ini kehadiran Amerika Serikat justru memberikan ancaman bagi klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan. Mengingat Amerika Serikat bukanlah ‘pemain baru’ dalam politik internasional, kehadiran Amerika Serikat di Asia Tenggara justru menambah hambatan bagi Cina untuk mempertahankan klaim kedaulatannya di Laut Cina Selatan demi mencapai kepentingan nasionalnya tersebut.

### **2.2.3 Aliansi Keamanan AUKUS dan Kondisi Keamanan di Indo Pasifik**

Amerika Serikat saat ini memang merupakan negara yang dapat dikatakan sebagai negara yang mendominasi sistem internasional. Tetapi sejak kebangkitan ekonomi China yang begitu cepat, membuat Amerika merasa terancam akan apa perkembangan China. Ancaman yang dirasakan Amerika Serikat ini tentu datang dari cepatnya laju pertumbuhan ekonomi China yang kemudian dikonversi oleh China dalam memperbaiki segala sektor khususnya meningkatkan kapabilitas militer mereka. Dengan kebangkitannya China berpotensi menjadi hegemon baru di Asia Pasifik, khususnya kawasan Indo-Pasifik yang dianggap sebagai kawasan yang strategis. Hal ini terbukti dengan negara-negara pada kawasan tersebut yang mulai menginginkan untuk bekerjasama dengan China terkhusus kerjasama ekonomi dengan China. Menurut *Global Firepower (GFP)*, pada tahun ini Cina menempati peringkat ke-3 dari 142 negara di dunia dalam kekuatan militer. Pada

update tahunan yang dilakukan oleh GFP ini, PowerIndex Cina hampir dikatakan sempurna yaitu 0,0511 (skor 0,0000 dianggap sempurna).<sup>23</sup>

Keberlanjutan dari persepsi AS akan ancaman keamanan oleh Cina ini terlihat dari bagaimana anggaran militer Cina yang kian meningkat pada tiap tahunnya. Pada 2012 saja Cina telah meningkatkan anggaran militernya sebanyak 11,2% dari tahun sebelumnya dimana anggaran militer Cina. Angka tersebut sangatlah fantastis melihat anggaran militer Cina pada 2011 hanya 601.1 miliar Yuan. Meskipun angka ini masih berada di bawah anggaran militer milik AS, tetapi ini menjadikan Cina sebagai negara dengan anggaran militer terbesar kedua di dunia di bawah AS. Terhitung hingga tahun 2021 anggaran yang dikeluarkan oleh Cina untuk belanja militer berada pada angka 1.350 miliar Yuan.<sup>24</sup>

Bagi China sendiri, kehadiran Amerika Serikat di Asia Pasifik membuat China ingin merevisi tatanan regional yang ada dengan dipimpin oleh negara-negara kawasan Asia sendiri. Meski begitu, China tidak mengambil jalur agresif untuk mewujudkan keinginannya ini mengingat China yang hanya memiliki aliansi dengan Korea Utara yang memiliki sejarah panjang dengannya.<sup>25</sup>

Amerika yang merasa terancam dengan posisi China yang kian menguat pada tatanan regional, kemudian bersama dengan Inggris dan Australia untuk

---

<sup>23</sup> Global Firepower, 2022, *China Military Strength*. Global Firepower. Retrieved August 18, 2023, from [https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country\\_id=china](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=china)

<sup>24</sup> Global Times. (2022, October 2), Retrieved August 18, 2023, from <https://www.globaltimes.cn/Portals/0/attachment/2021/2021-03-04/c24adfd0-313d-4c68-9de9-402cbb026c41.jpeg>

<sup>25</sup> R. Ebbighausen, 2022, *How China's rise is reshaping the Indo-Pacific security order – DW – 12/31/2022*. DW. Retrieved August 18, 2023, from <https://www.dw.com/en/how-chinas-rise-is-reshaping-indo-pacific-security-order/a-64165164>

membentuk aliansi yang dinamakan AUKUS dengan tujuan yang berfokus pada keamanan di Indo-Pasifik. Kerjasama ini sebenarnya juga berpengaruh pada instabilitas politik Uni Eropa pada akhir 2021 lalu lalu mengingat Prancis yang merasa terkianati oleh Australia mengenai kerjasama kapal selam yang dibatalkan oleh Australia yang memilih untuk bergabung dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk membentuk aliansi keamanan. Menurut kaum *mainstream* seperti neoliberal dan neorealis ini menjadi wajar melihat apa yang didapatkan Australia dari kerjasama dengan Inggris dan AS ini jika di akumulasi bisa lebih diuntungkan dibandingkan dengan kerjasama dengan Prancis secara ekonomi. Dalam hal keamanan, Australia mendapatkan kapal selam nuklir serta peningkatan dalam postur militernya.

Hingga kini para pengkaji hubungan internasional memandang bahwa terbentuknya AUKUS didasarkan pada ketakutan akan ancaman keamanan yang masing-masing dimiliki oleh Amerika Serikat-Australia dan China di kawasan Indo-Pasifik. Pandangan-pandangan *mainstream* ini hanya tertuju pada bagaimana kapal selam bertenaga nuklir yang diberikan pada Australia dianggap mengancam stabilitas keamanan kawasan Indo-Pasifik. Selain itu berbagai respon muncul karena pakta trilateral yang memberi Australia kapal selam bertenaga nuklir tersebut dianggap melanggar perjanjian nonproliferasi penggunaan senjata nuklir.

China maupun Amerika Serikat sama-sama memiliki ketakutan pada setiap pergerakan lawannya satu sama lain. Persepsi akan ancaman ini kemudian kian merujuk ke arah yang lebih merusak pasca Amerika memilih untuk membentuk Pakta Trilateral AUKUS bersama dengan Inggris dan Australia. Meski pihak

AUKUS berdalih bahwa kapal yang diberikan pada Australia hanya menggunakan tenaga nuklir, bukan bersenjata nuklir, namun itu tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian nonproliferasi penggunaan senjata nuklir. Dengan begitu neorealis beranggapan bahwa perlombaan senjata ini akan terus berlangsung entah sampai kapan karena kondisinya sudah berada pada kondisi yang spiral<sup>26</sup> dan tidak menentu.



---

<sup>26</sup> Kondisi dalam pandangan neorealis yang menentukan hubungan dari pihak yang berseteru akan menuju ke arah yang lebih destruktif atau akan tetap bertahan pada persepsi akan ancaman akibat struktur internasional yang anarki.